



# LAPORAN EVALUASI HASIL RENCANA KERJA

# 2023



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 telah dapat diselesaikan, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 berpedoman Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja .

Berdasarkan ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil rencana kerja perangkat daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja sebagai instrument pengukuran capaian kinerja perangkat daerah. Selain sebagai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja laporan ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode selanjutnya.

Saran dan masukan yang bersifat membangun guna kesempurnaan Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetap kami harapkan. Kami menyadari dalam penyusunan laporan evaluasi Renja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang dapat lebih baik lagi.

Bojonegoro, 8 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE.,MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691128 200312 2 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN.....	2
<b>BAB II KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA PD ...</b>	<b>3</b>
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR</b>	
<b>TAHUN 2023.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT CAPAIAN KINERJA.....</b>	<b>23</b>
A. FAKTOR PENDORONG .....	23
B. FAKTOR PENGHAMBAT .....	23
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT .....</b>	<b>27</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 KONSISTENSI TRIWULAN AKHIR RENJA PERANGKAT DAERAH DENGAN REALISASI TRIWULAN AKHIR DPA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV TAHUN 2023.....	4
Tabel 3.1 SKALA PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR POSITIF .....	10
Tabel 3.2 SKALA PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN KINERJA INDIKATOR NEGATIF.....	11
Tabel 3.3 PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023 .....	12

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam pelaksanaannya Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 259, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah merupakan siklus yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil, merupakan evaluasi pelaksanaan Renja pada akhir periode triwulan, memuat pelaksanaan Renja sejak awal sampai dengan akhir tahun periode Renja untuk mengetahui realisasi capaian target kinerja sasaran tahunan dan program / kegiatan akhir tahun yang merupakan masukan bagi pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan.

Evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro disusun berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2023 serta alokasi dan realisasi anggaran program / kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023, melalui mekanisme analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada dokumen pelaksanaan anggaran untuk menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya baik teknis maupun non-teknis serta alternatif pemecahan/tindak lanjutnya yang akan dilakukan.

## **B. TUJUAN**

Tujuan dari Penyusunan Laporan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah :

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan anggaran serta kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target dan sasaran tahunan.
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran prioritas pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja Tahun berikutnya.



## **BAB II**

### **KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten.

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan instrumen penting bagi Pemerintah dalam menentukan Prioritas Pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif pada triwulan akhir Renja Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada realisasi triwulan akhir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Pelaksanaan konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Renja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam Tabel. 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Konsistensi Triwulan Akhir Renja Perangkat Daerah dengan Realisasi Triwulan Akhir DPA Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2023

Kode	Triwulan Akhir Renja PD						Realisasi Triwulan Akhir DPA PD						Tidak Konsisten	Dasar Kebijakan
	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Dana Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Anggaran(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
	<b>KEUANGAN</b>													
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>													
5.2.1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan penunjangurusan pemerintahan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Aparatur Pemerintah</b>	<b>8.620.407.990</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase layanan penunjangurusan pemerintahan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Aparatur Pemerintah</b>	<b>7.042.469.328</b>		
5.1.2.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	434.836.895	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	421.115.971		
5.1.2.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	3 Dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	6.372.878	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun	3 Dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.993.015		
5.1.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	11 Rka kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.977.688	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD yang tersusun	11 Rka kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.777.545		
5.1.2.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan kegiatan SKPD yang tersusun	11 Rka Perubahan kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	6.403.953	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan kegiatan SKPD yang tersusun	11 Rka Perubahan kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.399.770		
5.1.2.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	11 dpa kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	6.441.638	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	11 dpa kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.547.415		
5.1.2.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	11 dpa Perubahan kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	6.468.858	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	11 dpa Perubahan kegiatan SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.893.990		
5.1.2.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	296.702.690	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	289.194.066		
5.1.2.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	12 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	106.469.230	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	12 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	103.310.170		
5.1.2.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	8 layanan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	6.741.148.209	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercukupi	8 layanan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.380.190.898		
5.1.2.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	6.007.034.899	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	4.962.767.481		
5.1.2.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	710.510.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan pengelolaan keuangan yang terpenuhi	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	394.575.572		
5.1.2.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	3.323.590	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase SPP/SPM yang diverifikasi	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	3.226.450		
5.1.2.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	2.651.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	2.554.405		
5.1.2.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	6 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	2.701.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun yang disusun	6 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	2.451.780		
5.1.2.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan yang disusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.984.300	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan yang disusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.820.745		
5.1.2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	11.651.950	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	11.497.015		
5.1.2.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosirealisasi anggaran yang disusun	2 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.297.470	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosirealisasi anggaran yang disusun	2 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.297.450		
5.1.2.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	107.314.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun	1 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	103.582.000		
5.1.2.2.05.5	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1 laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	107.314.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan kepegawaian yang tersusun	1 laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	103.582.000		
5.1.2.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	443.114.350	Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	428.991.687		



Triwulan Akhir Renja PD							Realisasi Triwulan Akhir DPA PD								
Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Dana Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Anggaran(Rp)	Tidak Konsisten	Dasar Kebijakan	
5.1.2.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	12.320.110	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	12.254.250			
5.1.2.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	160.927.005	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	157.400.012			
5.1.2.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	208.303.735	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	203.357.700			
5.1.2.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	8.961.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	7.569.725			
5.1.2.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.070.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	3.530.000			
5.1.2.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	47.532.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penataan arsip	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	44.880.000			
5.1.2.2.08	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	464.765.786	Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	315.208.472			
5.1.2.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	26.475.775	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	24.521.425			
5.1.2.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	148.724.843	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	74.965.467			
5.1.2.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	289.565.168	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	215.721.580			
5.1.2.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	20 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	429.318.750	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	20 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	393.380.300			
5.1.2.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	291.441.250	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	260.789.000			
5.1.2.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	10 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	73.877.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan peralatan mesin yang disediakan	10 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	70.677.600			
5.1.2.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	64.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan/rehabilitasi gedung/kantor yang disediakan	12 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	61.913.700			
<b>5.2.2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>% OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Aparatur Pemerintah</b>	<b>1.639.927.033.421</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>% OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Aparatur Pemerintah</b>	<b>1.296.494.117.219</b>			
		% OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah			% OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	-			
		% OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah			% OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	-			
5.2.2.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.602.315.500	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.359.680.642			
5.2.2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	45.156.100	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	43.713.760			
5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	45.185.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah koordinasi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	35.109.380			
5.2.2.2.01.3	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	18.990.400	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyelesaikan dokumen RKA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	16.054.500			
5.2.2.2.01.4	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan RKA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	32.994.500	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan RKA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	26.813.600			
5.2.2.2.01.5	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.700.000	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD yang menyusun DPA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	4.714.500			
5.2.2.2.01.6	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	5.700.000	Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD menyusun Perubahan DPA tepat waktu	74 SKPD	BPKAD	Aparatur Pemerintah	4.350.500			

Kode	Triwulan Akhir Renja PD						Realisasi Triwulan Akhir DPA PD						Tidak Konsisten	Dasar Kebijakan
	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Dana Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Anggaran(Rp)		
5.2.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240 buku	BPKAD	Aparatur Pemerintah	302.182.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	240 buku	BPKAD	Aparatur Pemerintah	218.246.547		
5.2.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480 buku	BPKAD	Aparatur Pemerintah	297.858.600	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	480 buku	BPKAD	Aparatur Pemerintah	223.438.860		
5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasiderta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah kegiatan pembahasan regulasi/kebijakan tentang AnggaranDaerah	24 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	793.294.100	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah kegiatan pembahasan regulasi/kebijakan tentang AnggaranDaerah	24 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	735.851.113		
5.2.2.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusuntepat waktu	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.838.550	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi perencanaan AnggaranPendapatan yang disusun tepat waktu	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.550.800		
5.2.2.2.01.11	Koordinasi Perencanaan AnggaranBelanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusun tepat waktu	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	2.160.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah koordinasi perencanaan AnggaranBelanja Daerah yang disusun tepat waktu	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.855.520		
5.2.2.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang disusuntepat waktu	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.914.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah koordinasi perencanaan AnggaranBelanja Daerah yang disusun tepat waktu	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.585.120		
5.2.2.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yang dibina tentang penganggaranDaerah	74 orang	BPKAD	Aparatur Pemerintah	49.340.550	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasubag prolap/ PPTK/KPA yangdibina tentang penganggaran Daerah	74 orang	BPKAD	Aparatur Pemerintah	46.396.442		
5.2.2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaanperbendaharaan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.018.871.208	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaanperbendaharaan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	911.385.591		
5.2.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yangdifasilitasi	2 kegiatan rekon	BPKAD	Aparatur Pemerintah	154.231.450	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi kebutuhan kas yangdifasilitasi	2 kegiatan rekon	BPKAD	Aparatur Pemerintah	127.650.535		
5.2.2.2.02.3	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD OPD yangdisiapkan tepat waktu	148 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	138.854.050	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD OPD yang disiapkantepat waktu	148 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	126.276.809		
5.2.2.2.02.5	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	114.526.740	Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan penatausahaan Dana Transfer lainnya tepat waktu	12 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	104.154.045		
5.2.2.2.02.6	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai	1 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	310.838.000	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaantransaksi non tunai	1 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	280.163.962		
5.2.2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah tepat waktu	12 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	122.374.960	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah tepat waktu	12 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	118.015.215		

Kode	Triwulan Akhir Renja PD						Realisasi Triwulan Akhir DPA PD						Tidak Konsisten	Dasar Kebijakan
	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Dana Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Anggaran(Rp)		
5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24 kali	BPKAD	Aparatur Pemerintah	178.046.008	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Penatausahaan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran	24 kali	BPKAD	Aparatur Pemerintah	155.125.025		
5.2.2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	720.406.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	572.366.972		
5.2.2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	125.743.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah rekonsiliasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	95.406.500		
5.2.2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	38.118.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah rekonsiliasi dan verifikasi Kewajiban Ekuitas Pendapatan Belanja Pembiayaan Pendapatan-LO dan Beban	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	33.351.000		
5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	3 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	48.538.400	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan dan Semesteran yang disusun tepat waktu	3 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	44.751.800		
5.2.2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	12.210.900	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Keuangan Konsolidasi SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	10.829.500		
5.2.2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	169.419.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan PERDA dan Rancangan PERBUP Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	155.561.800		
5.2.2.2.03.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	12.179.400	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	758.000		
5.2.2.2.03.7	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	155.286.900	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Prosentase Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah yang diselesaikan tepat waktu	70%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	101.722.750		
5.2.2.2.03.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	12.943.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	10.759.000		
5.2.2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	34.764.700	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	31.310.311		
5.2.2.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	34.124.700	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	30.806.311		
5.2.2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	4 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	39.052.000	Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan	4 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	24.768.000		

Kode	Triwulan Akhir Renja PD						Realisasi Triwulan Akhir DPA PD						Tidak Konsisten	Dasar Kebijakan
	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Dana Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Anggaran(Rp)		
5.2.2.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	4 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	12.515.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten yang dilaksanakan	4 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	11.771.000		
5.2.2.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	25.466.000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	20.571.000		
5.2.2.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.635.792.020.213	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.292.925.701.218		
5.2.2.2.04.2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen analisis investias yang disusun tepat waktu	11 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	363.706.070	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen analisis investasi yang disusun tepat waktu	11 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	313.768.700		
5.2.2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.543.038.071.798	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	persentase bantuan Keuangan yang disalurkan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.229.136.071.450		
5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	65.993.420.313	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	persentase Belanja Tidak Terduga yang disalurkan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	37.321.031.053		
5.2.2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	26.396.822.032	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	persentase Belanja Transfer yang disalurkan tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	26.154.830.015		
5.2.2.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	793.420.500	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase SKPD menyampaikan Laporan Keuangan berbasis Aplikasi sesuai ketentuan	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	724.982.868		
5.2.2.2.05.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8 data keuangan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	237.300.000	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan data keuangan yang disusun tepat waktu	8 data keuangan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	227.527.010		
5.2.2.2.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8 sistem Informasi	BPKAD	Aparatur Pemerintah	310.478.500	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan yang diimplementasikan dan dilaksanakan pemeliharaan	8 sistem Informasi	BPKAD	Aparatur Pemerintah	271.314.808		
5.2.2.2.05.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	245.642.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan peningkatan penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	1 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	226.141.050		
<b>5.2.3</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Aparatur Pemerintah</b>	<b>1.654.577.915</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase OPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>BPKAD</b>	<b>Aparatur Pemerintah</b>	<b>1.451.135.417</b>		
5.2.3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.654.577.915	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	1.451.135.417		
5.2.3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	15.561.000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	14.362.827		
5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	93.594.600	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	76.513.950		
5.2.3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	48.603.500	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen kebijakan barang milik daerah yang sesuai ketentuan	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	41.491.000		
5.2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	372.961.885	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman Penataan barang milik daerah yang ditetapkan tepat waktu	1 dokumen	BPKAD	Aparatur Pemerintah	324.276.344		
5.2.3.2.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	47.500.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang diinventarisir tepat waktu	100%	BPKAD	Aparatur Pemerintah	45.117.000		
5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	450 berkas	BPKAD	Aparatur Pemerintah	476.690.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengajuan Sertifikasi Tanah Milik Pemda ke BPN yang difasilitasi	450 berkas	BPKAD	Aparatur Pemerintah	434.732.520		
5.2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200 bidang	BPKAD	Aparatur Pemerintah	179.308.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dinilai tepat waktu	200 bidang	BPKAD	Aparatur Pemerintah	140.373.000		
5.2.3.2.01.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000 unit	BPKAD	Aparatur Pemerintah	23.750.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pengelolaannya	1000 unit	BPKAD	Aparatur Pemerintah	21.982.000		

Kode	Triwulan Akhir Renja PD						Realisasi Triwulan Akhir DPA PD						Tidak Konsisten	Dasar Kebijakan	
	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Dana Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Lokasi	Kel. Sasaran	Anggaran(Rp)			
5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan, dimusnahkan dan dihapus	100 unit	BPKAD	Aparatur Pemerintah	238.301.980	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dipindahtanganan, dimusnahkan dan dihapus	100 unit	BPKAD	Aparatur Pemerintah	214.085.576			
5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	85.832.200	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi penyusunan laporan BMD	2 kegiatan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	73.708.000			
5.2.3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	16.474.750	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	2 Laporan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	16.199.000			
5.2.3.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	2 pembinaan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	56.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan BMD	2 pembinaan	BPKAD	Aparatur Pemerintah	48.294.200			
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>1.650.202.109.326</b>							<b>1.304.987.722.036</b>		

### BAB III

## CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH PADA AKHIR TAHUN 2023

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah, merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah

Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan

Adapun pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Utama dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*).

Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Indikator Positif**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Tinggi
4	76% sampai 90%	Tinggi
3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Rendah
1	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

Sebaliknya bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :



**Tabel 3.2**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Indikator Negatif**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Rendah
4	76% sampai 90%	Rendah
3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Tinggi
1	Kurang dari 50%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisis realisasi capaian kinerja program/kegiatan, maka capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro pada akhir Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Pelaksanaan Renja BPKAD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023

No	Tujuan /Sasaran	Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		PD Penanggung Jawab	
									K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3				4	5	6	8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15	
						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																		
38.						BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah					Opini BPK	WTP	WTP																
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah					% OPD yang menyampaikan Laporan sesuai SAP	%	100													100	-	100	
		5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	8,620,497,990	25	749,306,385		2,385,786,165		1,406,867,662		2,455,716,561		25	6,997,676,773	25	81	
		5	02	01	2.01	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	7	434,836,895	1	70,000,400	2	83,827,650	2	42,401,248	2	224,886,673	7	421,115,971	100	97		
		5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	6,372,838	1	1,249,400	-	2,050,000		605,000		2,088,615	1	5,993,015	100	94	
		5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	11	5,977,688	-	-	3	1,400,000	6	2,848,040	2	1,529,505	11	5,777,545	100	97	
		5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan kegiatan SKPD	11	6,403,953	-	-	3	1,750,000	6	2,639,770	2	1,010,000	11	5,399,770	100	84	
		5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA kegiatan SKPD	11	6,441,638	-	-	3	1,120,000	6	3,771,915	2	655,500	11	5,547,415	100	86	
		5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA kegiatan SKPD	11	6,468,858	-	-	3	1,800,000	6	2,739,490	2	1,354,500	11	5,893,990	100	91	
		5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	296,702,690	1	40,141,000	1	23,681,000		16,425,033	1	208,947,033	3	289,194,066	100	97	
		5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	106,469,230	3	28,610,000	3	52,026,650	3	13,372,000	3	9,301,520	12	103,310,170	100	97	
		5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tercover	layanan	8	6,741,148,209	2	613,157,855	2	2,087,861,530	2	1,245,181,914	2	1,433,989,599	8	5,380,190,898	100	80		
		5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41	6,007,034,899	41	535,962,755	41	1,994,463,409	41	1,131,539,852	41	1,300,801,465	41	4,962,767,481	100	83	
		5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	710,504,000	3	75,360,000	3	93,008,121	3	102,762,627	3	123,444,824	12	394,575,572	100	56	
		5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	814	3,323,590	200	-	200	60,000	200	2,001,500	214	1,164,950	814	3,226,450	100	97	
		5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	2,651,000	-	-		50,000		1,484,000	1	1,020,405	1	2,554,405	100	96	
		5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2,701,000	-	-		100,000		1,501,000	1	850,780	1	2,451,780	100	91	

		5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1,984,300	-	-	30,000	932,000	1	858,745	1	1,820,745	100	92		
		5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	11,651,960	1	1,835,100	100,000	4,394,935	5,166,980	1	11,497,015	100	99			
		5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	1,297,470	-	-	50,000	566,000	681,450	2	1,297,450	100	100			
		5	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang tersusun</b>	Laporan	1	107,314,000	-	1	28,150,000	2,635,000	72,797,000	1	103,582,000	100	97			
		5	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	107,314,000	-	2	28,150,000	2,635,000	72,797,000	2	103,582,000	100	97			
		5	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi umum yang tersusun</b>	kegiatan	12	443,114,350	3	-	75,086,200	27,237,000	323,104,687	12	425,427,887	100	96			
		5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12,320,110	3	-	-	10,289,000	1,965,250	12	12,254,250	100	99			
		5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	160,927,005	1	-	47,100,000	-	110,300,012	4	157,400,012	100	98			
		5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	208,303,735	-	-	9,471,200	-	190,322,700	2	199,793,900	100	96			
		5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	8,961,500	3	-	-	5,088,000	2,481,725	12	7,569,725	100	84			
		5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5,070,000	3	-	3,395,000	1,140,000	995,000	12	3,530,000	100	70			
		5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	47,532,000	-	-	17,120,000	10,720,000	17,040,000	3	44,880,000	100	94			
		5	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan</b>	kegiatan	12	464,765,786	3	27,928,630	64,106,285	-	181,944,802	12	273,979,717	100	59			
		5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	26,475,775	3	7,566,800	-	8,618,000	8,336,625	12	24,521,425	100	93			
		5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	148,724,843	3	-	12,347,750	916,000	61,701,717	12	74,965,467	100	50			
		5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	289,565,168	3	20,361,830	51,758,535	31,694,755	111,906,460	12	215,721,580	100	74			
		5	02	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah</b>	kegiatan	20	429,318,750	5	38,219,500	46,754,500	89,412,500	218,993,800	20	393,380,300	100	92			
		5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	291,441,250	8	38,219,500	43,734,500	64,412,500	114,422,500	33	260,789,000	100	89			
		5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	73,877,500	4	-	3,020,000	25,000,000	42,657,600	16	70,677,600	100	96			
		5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	64,000,000	-	-	-	-	61,913,700	6	61,913,700	100	97			
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah						% OPD yang menyusun Laporan sesuai SAP	%	100							100	-	100					
		5	02	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	% OPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan	%	100	1,639,927,033,421	25	118,466,365,506	388,933,270,953	312,807,396,954	476,287,083,876	100	1,296,524,210,291	100	79			
							% OPD yang menyerap Anggaran sesuai dengan perencanaan	%	100		25	25	25	25	100	-	100						
							% OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	%	100		25	25	25	25	100	-	100						
		5	02	02	2.01		<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase OPD yang menyusun rencana anggaran daerah sesuai ketentuan; Persentase dokumen anggaran daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	%	100	1,602,315,500	25	199,289,500	172,309,325	276,194,727	711,887,090	100	1,389,680,642	100	85			
		5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	45,156,100	-	-	13,821,000	9,656,000	20,236,760	2	43,713,760	100	97			
		5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	45,185,900	-	-	-	12,134,500	22,974,880	2	35,109,380	100	78			
		5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	18,990,400	-	-	-	14,698,900	1,355,600	70	16,054,500	100	85			

						5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	32,994,500	-	-	23	9,659,000	23	265,000	24	16,889,600	70	26,813,600	100	81	
						5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	5,700,400	-	-	23	100,000	23	308,500	24	4,306,000	70	4,714,500	100	83	
						5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	70	5,700,400	-	-	23	100,000	23	308,500	24	3,942,000	70	4,350,500	100	76	
						5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	240	302,182,000	60	56,017,000	60	9,988,000	60	23,544,027	60	128,697,520	240	218,246,547	100	72	
						5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	480	297,688,600	-	-	160	34,970,140	160	26,428,400	160	162,040,320	480	223,438,860	100	75	
						5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	24	793,294,100	6	137,003,098	6	92,399,185	6	185,549,900	6	320,898,930	24	735,851,113	100	93	
						5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	1,838,550	-	-	-	-	1	216,000	1	1,334,800	2	1,550,800	100	84	
						5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2	2,160,000	-	-	-	-	1	458,000	1	1,397,520	2	1,855,520	100	86	
						5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	Dokumen	2	1,914,000	-	-	-	-	1	1,402,000	1	183,120	2	1,585,120	100	83	
						5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	70	48,340,550	17	6,269,402	17	11,272,000	18	1,225,000	18	27,630,040	70	46,396,442	100	94	
						5	02	02	2.02		<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan tepat waktu</b>	%	100	1,018,871,208	25	194,035,298	25	152,240,903	25	185,309,817	25	379,799,573	100	911,385,591	100	89	
						5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	154,231,450	1	32,885,260	-	33,315,450	-	20,354,250	1	41,095,575	2	127,650,535	100	83	
						5	02	02	2.02	03	Penyediaan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	148	138,854,050	37	35,718,310	37	23,197,365	37	33,468,139	37	33,892,995	148	126,276,809	100	91	
						5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	12	114,526,740	3	27,889,640	3	21,566,550	3	8,380,900	3	46,316,955	12	104,154,045	100	91	
						5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	dokumen	2	310,838,000	1	61,002,058	-	32,672,114	-	87,331,528	1	99,158,262	2	280,163,962	100	90	
						5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	122,374,960	3	6,244,990	3	11,871,000	3	18,830,000	3	81,069,225	12	118,015,215	100	96	
						5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	840	178,046,008	210	30,295,040	210	29,618,424	210	16,945,000	210	78,266,561	840	155,125,025	100	87	
						5	02	02	2.03		<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sesuai ketentuan</b>	%	100	720,406,000	25	73,478,098	25	70,626,788	25	178,240,202	25	250,021,884	100	572,366,972	100	79	
						5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	268	125,743,000	67	32,500,000	67	2,085,500	67	1,600,000	67	59,221,000	268	95,406,500	100	76	
						5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	134	38,118,000	33	8,506,000	33	6,500,000	33	17,245,000	35	1,100,000	134	33,351,000	100	87	
						5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	6	48,583,400	1	279,000	2	10,040,500	2	31,704,300	1	2,728,000	6	44,751,800	100	92	



		5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang difasilitasi pengelolaan barang milik daerahnya	%	100	1,654,577,915	25	139,958,612	25	253,157,332	25	226,300,724	25	831,718,749	100	1,451,135,417	100	88	
		5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen	1	15,561,000	-	-	-	-	-	-	-	14,362,827	-	14,362,827	-	92	
		5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	dokumen	1	93,594,600	1	25,866,950		9,830,000		12,980,000		27,837,000	1	76,513,950	100	82	
		5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	dokumen	1	48,603,500	-	-		3,150,000		13,780,000	1	24,561,000	1	41,491,000	100	85	
		5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	372,961,885	1	53,116,562		95,223,951		8,452,543		167,481,288	1	324,276,344	100	87	
		5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1	47,500,000	1	3,350,000		4,160,000		9,760,000		27,847,000	1	45,117,000	100	95	
		5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	12	476,690,000	3	31,849,800	3	80,727,381	3	62,112,281	3	260,043,058	12	434,732,520	100	91	
		5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	179,308,000	1	6,195,000		23,592,000		17,224,000		93,362,000	1	140,373,000	100	78	
		5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	4	23,750,000	1	-	1	1,920,000	1	9,897,000	1	10,165,000	4	21,982,000	100	93	
		5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	238,301,980	2	11,537,000	2	22,346,000	3	51,151,000	3	129,051,576	10	214,085,576	100	90	
		5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	2	85,632,200	1	5,750,000		5,760,000		30,615,000	1	31,583,000	2	73,708,000	100	86	
		5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1	16,474,750	-	-		-		-	1	16,199,000	1	16,199,000	100	98	
		5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	70	56,000,000	17	2,291,300	17	6,448,000	18	10,328,900	18	29,226,000	70	48,294,200	100	86	
<b>JUMLAH TOTAL</b>												1,650,202,109,326		119,355,630,503		391,572,214,450		314,454,308,258		479,574,519,188		1,304,987,722,336		79
<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>																					99	86		
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																					Sangat Baik	Baik		



Berdasarkan Tabel 3.3 Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 diatas yang merupakan evaluasi hasil Renja sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2023, diperoleh evaluasi hasil sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja sebesar 99 sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 79;
2. Predikat kinerja “Sangat Tinggi” dan predikat penyerapan anggaran “Baik”

Secara ringkas gambaran evaluasi hasil Renja untuk indikator tujuan, sasaran, program/kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi hasil capaian Tujuan/Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV, adalah:

1. Tujuan : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset milik daerah  
Indikator Tujuan : Opini BPK

Hasil Evaluasi :

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah terealisasi WTP

2. Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

Indikator sasaran :

- i. Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan

Hasil Evaluasi :

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100%

- ii. Persentase laporan keuangan OPD yang disusun sesuai SAP

Hasil Evaluasi

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100%

- iii. Persentase temuan BPK tentang pengelolaan keuangan yang ditindaklanjuti

Hasil Evaluasi

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 90% terealisasi 90%

- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah

- i. Persentase OPD yang tertib tata kelola barang milik daerah

Hasil Evaluasi

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 70% terealisasi 70%

- ii. Persentase laporan barang milik daerah yang disusun sesuai ketentuan

Hasil Evaluasi

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 95% terealisasi 95%

- iii. Persentase temuan BPK tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti

Hasil Evaluasi

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 60% terealisasi 60%

- b. Evaluasi hasil capaian Program Tahun 2023 sampai dengan Triwulan akhir Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

- i. Indikator Program :

Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan

- ii. Evaluasi hasil :

Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100%

- iii. Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :

- Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah predikat kinerja sangat tinggi;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah predikat kinerja sangat tinggi;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah predikat kinerja sangat tinggi
- Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah predikat kinerja sangat tinggi
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah predikat kinerja sangat tinggi

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- i. Indikator Program :

- Persentase SKPD yang menyusun RKA sesuai ketentuan;

- Persentase SKPD yang menyerap anggaran sesuai perencanaan
  - Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
- ii. Evaluasi hasil :  
Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100%
- iii. Pada kegiatan ini terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :
- Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah predikat kinerja sangat tinggi;
  - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah predikat kinerja sangat tinggi;
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah predikat kinerja sangat tinggi;
  - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah predikat kinerja sangat tinggi;
  - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- i. Indikator Program :
- Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan;
- ii. Evaluasi hasil :  
Predikat kinerja sangat tinggi nilai capaian 100% dari target yang ditetapkan 100% terealisasi 100%
- iii. Pada kegiatan ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :
- Pengelolaan Barang Milik Daerah predikat kinerja sangat tinggi;

## **BAB IV**

### **FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA**

Evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, ditemui beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Faktor pendorong dan penghambat dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **A. FAKTOR PENDORONG**

Yang menjadi faktor pendorong dalam pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Badan Penglolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dan dalam hal pemenuhan realisasi anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal;
3. Adanya Sinergitas antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga untuk penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa Baik yang bersifat umum maupun khusus dapat tersalur maksimal sesuai dengan kebutuhan desa dalam mendukung prioritas pembangunan daerah;

#### **B. FAKTOR PENGHAMBAT**

Yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Ketentuan maupun petunjuk teknis pelaksanaan dari Pemerintah Pusat atau Kementerian sehingga harus dilaksanakan penyesuaian anggaran maupun jadwal dan tata cara pelaksanaan program kegiatan.

2. Kurang responsifnya pemohon bantuan keuangan untuk segera memenuhi kekurangan apabila terdapat berkas ajuan yang kurang sesuai dengan ketentuan.
3. Perbedaan kapasitas Tim Evaluasi pada tiap-tiap SKPD dalam melaksanakan verifikasi berkas yang dapat menghambat proses penyaluran bantuan keuangan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAKLANJUT**

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja program/kegiatan, sebagaimana evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. KESIMPULAN**

1. Memperhatikan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja Renja Tahun 2023, yaitu koordinasi yang baik antar unit kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro serta kepatuhan dalam tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran maka hal tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi, disamping itu juga diupayakan untuk mengeliminir faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja
2. Agar capaian kinerja di tahun mendatang dapat lebih optimal, maka kedepan mekanisme evaluasi kinerja dan anggaran perlu didukung sistem informasi evaluasi kinerja agar pelaksanaannya lebih efektif dan terdokumentasi secara elektronik.

#### **B. REKOMENDASI TINDAKLANJUT**

Rekomendasi dan tindaklanjut atas capaian kinerja yang kurang dan tidak optimal, maka ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Melakukan kajian dan evaluasi mendalam dengan melibatkan beberapa pihak untuk mengkaji secara mendalam, dengan analisis masalah dan optimalisasi sumberdaya yang ada sehingga menghasilkan Rekomendasi-rekomendasi yang bagus untuk ditindaklanjuti dan bisa dilaksanakan menjadi arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selanjutnya menjadi lebih baik;
2. Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder (antar SKPD maupun dengan instansi vertical) dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;



3. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
4. Kegiatan yang mendukung kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro segera dilaksanakan sehingga target kinerja dapat tercapai;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-masing bidang secara berkala.

Demikian evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023 disusun dalam rangka untuk mendapatkan gambaran capaian kinerja secara akuntabel. Selanjutnya Evaluasi hasil Renja akan dijadikan sebagai bahan penyusunan dan kebijakan dalam Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun berikutnya dan bahan masukan dalam perubahan Renja, untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan.

Bojonegoro, 8 Januari 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



**LULUK ALIFAH, SE.,MM**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19691128 200312 2 0**